

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Absensi Sadewa dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol (KOMPIMPRO) Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi sistem ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata terhadap mekanisme pengawasan kehadiran pegawai. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai proses adaptasi, kendala teknis, dan dinamika organisasi yang mewarnai perjalanan implementasinya sejak diterapkan secara efektif pada 1 September 2022.

Pada tahap awal implementasi, proses instalasi dan registrasi Sadewa memerlukan penyesuaian yang cukup signifikan dari seluruh pegawai. Peralihan dari sistem absensi fingerprint menuju sistem berbasis deteksi wajah dan lokasi merupakan perubahan besar yang menuntut pegawai untuk mempelajari mekanisme baru secara menyeluruh. Proses aktivasi akun tidak selalu berjalan mulus karena beberapa pegawai menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital, gangguan teknis pada aplikasi, serta kebutuhan verifikasi data kepegawaian yang memerlukan waktu. Akibatnya, sebagian pegawai memerlukan bantuan langsung dari administrator sistem sebelum akun mereka dapat digunakan

secara mandiri. Kondisi serupa juga ditemukan pada tahap registrasi wajah, di mana kualitas pencahayaan, stabilitas jaringan internet, dan kemampuan pengguna dalam mengikuti prosedur perekaman biometrik menjadi faktor penentu keberhasilan proses tersebut. Meskipun terdapat berbagai hambatan pada tahap awal, sebagian besar pegawai menilai bahwa sistem Sadewa jauh lebih praktis, fleksibel, dan aman dibandingkan sistem fingerprint yang sebelumnya digunakan, sehingga motivasi untuk beradaptasi tetap terjaga dengan baik.

Pada aspek prosedur absensi harian, implementasi Sadewa terbukti membawa perubahan yang lebih signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Pegawai tidak lagi terikat pada keharusan mendatangi satu titik mesin absensi di ruangan tertentu, melainkan dapat melakukan presensi dari berbagai titik dalam area Balai Kota melalui perangkat telepon genggam masing-masing. Sistem ini mengintegrasikan dua lapisan verifikasi secara bersamaan, yaitu pengenalan wajah dan deteksi lokasi berbasis GPS, sehingga validitas data kehadiran menjadi jauh lebih terjamin. Keberadaan fitur verifikasi berlapis ini secara langsung meminimalkan praktik titip absen yang sebelumnya berpotensi terjadi ketika sistem hanya mengandalkan verifikasi berbasis titik lokasi saja. Pengembangan fitur pengenalan wajah dilakukan justru sebagai respons atas ditemukannya celah penyalahgunaan pada tahap awal penerapan sistem, yang menunjukkan bahwa pengelola sistem bersikap adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Selain kemudahan teknis, sistem ini juga memberikan fleksibilitas khusus bagi pegawai dengan mobilitas kerja tinggi seperti petugas protokol dan peliputan, yang dapat melakukan absensi secara mandiri dari lokasi tugas selama masih

berada dalam wilayah Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa Sadewa tidak hanya dirancang sebagai alat pengawasan yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pekerjaan yang beragam di lingkungan KOMPIMPRO.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kedisiplinan pegawai, implementasi Sadewa memberikan dampak yang cukup terasa melalui mekanisme pencatatan otomatis yang terintegrasi dengan sistem pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2024, setiap pegawai yang keterlambatannya terakumulasi lebih dari 30 menit dalam satu bulan akan dikenai pemotongan TPP sebesar 2,5% dan berlaku kelipatannya. Adanya konsekuensi finansial yang langsung dan terukur ini terbukti menjadi pendorong yang kuat bagi pegawai untuk lebih memperhatikan ketepatan waktu kehadiran mereka. Para pegawai mengakui bahwa mereka menjadi lebih disiplin dalam mengatur waktu keberangkatan, lebih aktif memantau akumulasi keterlambatan setiap bulan, dan berupaya datang lebih awal agar tidak terkena sanksi.

Perubahan perilaku ini mencerminkan bahwa sanksi yang dikaitkan langsung dengan hak keuangan pegawai mampu menciptakan motivasi ekstrinsik yang cukup efektif dalam membangun budaya disiplin kehadiran. Meski demikian, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada besaran pemotongan yang diterapkan. Ketika pemotongan dianggap signifikan, tingkat kepatuhan pegawai cenderung lebih tinggi, dan

sebaliknya. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan efektivitas sanksi perlu didukung oleh evaluasi kebijakan yang berkala agar tetap relevan sebagai instrumen pengendalian disiplin.

Keberhasilan implementasi Sadewa juga dapat dipahami melalui analisis faktor-faktor pendukung menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, proses sosialisasi sistem telah berjalan dengan cukup baik melalui berbagai saluran internal organisasi, mulai dari panduan penggunaan aplikasi, pemberitahuan perubahan sistem, hingga koordinasi melalui grup komunikasi internal ketika terjadi gangguan teknis. Kejelasan informasi mengenai tata cara absensi, mekanisme sanksi, dan prosedur penanganan kendala membuat pegawai memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan sistem ini.

Dari sisi sumber daya, implementasi Sadewa didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, mencakup server, sistem pengenalan wajah, GPS, jaringan internet, serta aplikasi mobile yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui perangkat telepon genggam pribadi mereka. Sumber daya manusia juga tersedia dalam bentuk administrator sistem dan pengelola kepegawaian yang bertugas memastikan kelancaran operasional sistem sehari-hari. Dari sisi disposisi, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap yang positif dan menerima keberadaan Sadewa sebagai sistem yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Penerimaan ini didukung oleh persepsi pegawai bahwa sistem baru lebih

transparan, akuntabel, dan adil karena data kehadiran diproses secara otomatis tanpa intervensi manual yang berpotensi menimbulkan subjektivitas. Dari sisi struktur birokrasi, implementasi Sadewa ditopang oleh regulasi yang kuat berupa Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2024, SOP yang terstruktur, serta pembagian peran yang jelas antara BKPP, Diskominfo, administrator sistem, pimpinan unit kerja, dan pegawai sebagai pengguna. Struktur yang jelas ini memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan sistem dapat berjalan secara terkoordinasi dan konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi Sistem Absensi Sadewa di Bagian KOMPIMPRO Kota Semarang telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat mekanisme pengawasan kehadiran dan mendorong terbentuknya budaya disiplin kerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sistem ini berhasil mengubah pola absensi pegawai dari yang sebelumnya berbasis perangkat fisik menuju sistem digital yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi antara teknologi yang tepat guna, regulasi yang mendukung, komunikasi yang efektif, serta sikap positif pegawai terhadap perubahan. Dengan terus dilakukannya pengembangan dan evaluasi sistem secara berkala, Sadewa berpotensi menjadi model pengelolaan absensi yang dapat direplikasi oleh instansi pemerintah lain di luar Kota Semarang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, disiplin, dan berbasis teknologi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Absensi Sadewa dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol (KOMPIMPRO) Kota Semarang, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai sebagai implementor dari sistem absensi Sadewa:

1. Bagi Pegawai Komunikasi, Pimpinan, dan Protokol (KOMPIMPRO) Kota Semarang
 - a. Pegawai diharapkan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam mematuhi aturan absensi, tidak semata-mata karena adanya sanksi finansial, melainkan sebagai bentuk profesionalisme dan komitmen terhadap pelayanan publik.
 - b. Pegawai yang mengalami kendala teknis dalam menggunakan Sadewa dianjurkan untuk segera melaporkan kepada pengelola sistem dan tidak menunda proses klarifikasi agar data kehadiran tetap akurat.
2. Bagi Pemerintah Kota Semarang
 - a. Perlu memperkuat infrastruktur jaringan internet di lingkungan Balai Kota agar proses absensi melalui Sadewa tidak terganggu oleh koneksi yang tidak stabil, sehingga kelancaran presensi pegawai dapat lebih terjamin.

- b. Penyempurnaan fitur notifikasi pengingat absensi dalam aplikasi Sadewa perlu dilakukan untuk mengurangi kasus lupa absensi, baik absen masuk maupun absen pulang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji secara lebih mendalam dampak jangka panjang sistem absensi digital terhadap kinerja dan produktivitas pegawai secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi kedisiplinan kehadiran.
- b. Perlu dilakukan penelitian komparatif antar-SKPD di Kota Semarang untuk mengidentifikasi pola keberhasilan implementasi Sadewa yang dapat dijadikan model replikasi bagi instansi lain